KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 4 4 7  H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Final Tidak Final	
A. IDENTITAS PE	ENERIMA PENGHASIL	AN YANG	DIPOTONG					
A.1 NPWP : 0 9 6 9 1 2 4 6 4 7 2 2 0 0 0								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : AGUSTINUS DALIDJO								
B. PPh PASAL 2	1 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01		3.617.500	3.617.500	0	5	180.875	
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Biaya Pembayaran  Tanggal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy  B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyyy  B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :  B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0					
C.2 Nama Instansi Pemerintah :			RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3 ID Subunit Organisasi :								
C.4 Tanggal :		1 3	1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :		HARI	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							benar dan telah saya	
			dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajal ukan tanda tangan.	k mengatur bahwa (	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	
378	N9PYO							